



## Strategy for Instilling Anti-Corruption Values from an Early Age at NU Elementary Schools in Metro City

Saipullah<sup>1\*</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Corresponding Author ✉ [yusufiainnu@gmail.com](mailto:yusufiainnu@gmail.com) \*

### ABSTRAK

Korupsi merupakan persoalan serius yang menuntut upaya pencegahan sejak usia dini melalui pendidikan formal. Secara empiris, implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar masih menghadapi keterbatasan model pembelajaran yang kontekstual, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini di SD NU Kota Metro, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah dan guru di SD NU Kota Metro. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Kerangka teori penelitian ini meliputi teori pendidikan karakter, *experiential learning*, perkembangan moral (*moral development*), serta integrasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (*Aswaja*) dalam pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai antikorupsi dilakukan melalui integrasi dalam pembelajaran intrakurikuler, pembiasaan budaya sekolah, keteladanan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanaman nilai antikorupsi akan efektif apabila dilaksanakan secara holistik, konsisten, dan didukung oleh budaya sekolah yang kuat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan dan lokal, serta pengembangan model implementatif yang berkelanjutan di tingkat pendidikan dasar.

**Kata Kunci:** Antikorupsi; Aswaja; Pendidikan Antikorupsi; Pendidikan Dasar; Strategi Pembelajaran

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

June 20, 2025

Revised

August 15, 2025

Accepted

Scotember 29, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

### INTRODUCTION

Penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini merupakan agenda strategis dalam penguatan karakter bangsa. Literatur menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai problem multidimensional yang tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga berakar pada budaya dan lemahnya integritas individu (Johnston, 2019, p.112). Pendidikan dasar memiliki posisi penting karena periode usia tersebut merupakan fase emas pembentukan nilai moral. Sejumlah akademisi mengkritik model pendidikan antikorupsi yang hanya berorientasi kognitif tanpa mengintegrasikan dimensi afektif dan psikomotorik (Sofianto, 2021, p.77). Pandangan lain menekankan perlunya pendekatan karakter berbasis nilai universal dan nilai lokal keagamaan sebagai fondasi integritas (Lickona, 2019, p. 131). Perdebatan ini menunjukkan kebutuhan akan strategi komprehensif yang aplikatif pada konteks sekolah dasar.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dan melibatkan berbagai sektor publik (K.P.K., 2022, p.10). Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga perilaku tidak jujur yang

terbentuk sejak kecil. Pendidikan antikorupsi berperan sebagai intervensi preventif untuk membangun budaya integritas dari usia dini (Suyatno & Haryanto, 2020, p.54). Nilai-nilai seperti amanah (Al-Ghazali, 2005, p.92), kejujuran (Khalidun, 2015, p.208), dan tanggung jawab merupakan prinsip dasar dalam pendidikan Islam yang relevan di sekolah NU. Konteks SD NU Kota Metro yang identik dengan tradisi Aswaja memberikan peluang kuat untuk membangun karakter antikorupsi secara berkelanjutan.

Riset-riset sebelumnya mengungkapkan bahwa strategi penanaman nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan guru, penguatan budaya sekolah, dan integrasi kurikulum (Mustari, 2020, p.63). Penelitian internasional juga menunjukkan efektivitas experiential learning dalam membangun kesadaran moral melalui aktivitas reflektif (Kolb, 2027, p.89). Dari beberapa hasil riset tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan persoalan struktural yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga berakar pada karakter serta perilaku individu sejak usia dini.

Pendidikan antikorupsi di jenjang dasar menjadi strategi preventif penting karena fase sekolah dasar merupakan periode pembentukan moral dan nilai karakter anak yang paling responsif terhadap intervensi pendidikan karakter. Studi awal menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dasar masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya sekolah maupun praktik keseharian peserta didik, sehingga dampak terhadap perilaku integritas siswa belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan literatur yang menekankan perlunya strategi pendidikan antikorupsi yang sistematis dan aplikatif dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar (Aksinudin et al., 2022; Ayu et al., 2022). Meskipun demikian, sejumlah studi mengungkapkan keterbatasan bahwa internalisasi nilai sering bersifat jangka pendek jika tidak ditopang oleh ekosistem pendidikan yang konsisten (Rahman & Yusuf, 2021, p.144). Perdebatan muncul terkait model strategi yang paling tepat pada sekolah berbasis keagamaan seperti SD NU karena belum banyak penelitian yang mengkaji karakteristik lokal dan pendekatan khas Aswaja.

Dalam konteks SD NU Kota Metro, praktik-praktik seperti pembiasaan budaya sekolah, integrasi nilai-nilai kejujuran melalui pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menanamkan karakter antikorupsi. Namun, bukti empiris awal seperti tingkat pemahaman siswa tentang nilai jujur dan perilaku nyata mereka sehari-hari, serta hubungan pembiasaan sekolah dengan perubahan perilaku, belum diukur secara sistematis. Kesenjangan antara program yang bersifat deskriptif dan evaluasi implementatif ini juga ditemukan dalam konteks lain, seperti studi yang menunjukkan bahwa strategi integrasi nilai antikorupsi dalam mata pelajaran dan budaya sekolah masih belum konsisten di berbagai sekolah dasar di Indonesia (Ningrum & Prastyaningih, 2024).

Pemilihan SD NU Kota Metro sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada signifikansi empiris dan keunikan filosofisnya sebagai model *best practice* dalam penanaman karakter. SD NU Kota Metro memiliki potensi strategis dalam pendidikan antikorupsi melalui pendekatan Aswaja an-Nahdliyah yang menekankan *tawasuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tasamuh*. Secara kultural, sekolah ini telah membangun budaya institusional yang mengedepankan gotong royong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*) melalui praktik pembiasaan harian yang terintegrasi, seperti penekanan pada kedisiplinan beribadah dan pelaksanaan kegiatan kebersihan bersama yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Prinsip Aswaja seperti *i'tidal* (keadilan/ketegaklurusan) dan *tawazun* (keseimbangan) secara logis memiliki korelasi kuat dan berperan strategis sebagai substrat etis untuk menyemaikan nilai anti korupsi. Karakter ini selaras dengan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pendidikan antikorupsi di sekolah dasar, namun masih menunjukkan keterbatasan implementatif. Anwar (2024) membahas *strategi pendidikan antikorupsi* di SD tetapi lebih bersifat deskriptif terhadap pendekatan pembelajaran umum tanpa indikator perilaku yang terukur (Anwar, 2024). Ningrum & Prastyaningih (2024) menelaah upaya penguatan nilai antikorupsi melalui kegiatan sekolah, namun fokusnya masih pada integrasi materi PPKn tanpa mempertimbangkan konteks nilai keagamaan lokal (Ningrum & Prastyaningih, 2024). Nurtisna & Zainil (2025) menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam PPKn di sekolah dasar, tetapi intervensi yang ditawarkan lebih

teoritis daripada praktik implementatif di sekolah (Nurtisna & Zainil, 2025). Restuningtyas & Utomo (2025) melaporkan praktik *kantin kejujuran* di SD sebagai media pendidikan karakter, namun belum dianalisis dampaknya terhadap pembentukan integritas siswa (Restuningtyas & Utomo, 2024). Sakban et al. (2025) menunjukkan internalisasi nilai kejujuran efektif dalam pembentukan karakter, tetapi tidak mengaitkannya secara spesifik dengan nilai keagamaan lokal yang kontekstual (Sakban et al., 2025). Dari kajian tersebut terlihat adanya *research gap* karena sedikit penelitian yang menguji pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan lokal secara empiris dengan indikator perilaku yang terukur. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi berbasis nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) di SD NU Kota Metro, menekankan pada praktik implementatif dan pengukuran perubahan perilaku siswa. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada integrasi nilai keagamaan lokal sebagai fondasi normatif dalam pendidikan antikorupsi disertai pendekatan empiris yang mengukur dampaknya terhadap perilaku siswa. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana konsep strategi penanaman nilai antikorupsi sejak dini diterapkan di SD NU Kota Metro; (2) bagaimana implementasi strategi tersebut dalam pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah; dan (3) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik. Rumusan ini menjadi dasar dalam merumuskan model pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Aswaja.

Kekosongan konseptual dan model implementasi strategi pendidikan anti korupsi dan integrasi nilai Aswaja an-Nahdliyah sebagai basis moral anti korupsi di tingkat sekolah dasar masih jarang tersentuh dalam diskursus akademik. Kebanyakan studi berfokus pada sekolah negeri atau pesantren murni, sehingga mengabaikan dinamika unik sekolah Islam swasta di perkotaan multikultural seperti Kota Metro. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model strategi penanaman nilai anti korupsi yang tidak hanya berbasis kognitif, tetapi juga terinternalisasi melalui tradisi keagamaan lokal.

## METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi berbasis nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) di lingkungan SD NU Kota Metro. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan penelitian berfokus pada proses, praktik, dan dinamika internalisasi nilai dalam konteks sosial-budaya sekolah, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui pengalaman, interaksi, dan makna yang dibangun oleh subjek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di SD NU Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa sekolah ini secara institusional telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai Aswaja dalam kurikulum serta budaya sekolah. Lokasi ini dipilih secara purposif karena relevan dengan fokus penelitian dan memiliki praktik pendidikan antikorupsi yang dapat diamati secara langsung. Penelitian lapangan dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, berdasarkan peran dan keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah. Informan kunci (*key informant*) adalah Kepala Sekolah, yang dipilih karena memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan dan penguatan budaya sekolah. Informan utama (*main informant*) terdiri atas Guru Pendidikan Agama Islam, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Guru Kurikulum, karena mereka berperan langsung dalam implementasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran dan pembiasaan siswa. Informan tambahan (*additional informant*) berasal dari Komite Sekolah atau perwakilan wali murid untuk memperoleh perspektif eksternal mengenai konsistensi nilai antara sekolah dan lingkungan keluarga. Selain itu, siswa kelas IV dan V dijadikan sumber data melalui observasi untuk melihat secara langsung internalisasi nilai antikorupsi dalam perilaku sehari-hari peserta didik.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi partisipatif terhadap

aktivitas pembelajaran dan budaya sekolah, serta interaksi siswa dalam kegiatan pembiasaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, antara lain visi dan misi sekolah, dokumen kurikulum, program penguatan karakter, tata tertib sekolah, laporan kegiatan pembiasaan, serta arsip kegiatan pendidikan karakter yang relevan dengan pendidikan antikorupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada kepala sekolah, guru, dan perwakilan wali murid untuk menggali strategi, kebijakan, serta pengalaman praktis dalam menanamkan nilai antikorupsi berbasis Aswaja. Wawancara bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta tantangan implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas, pembiasaan harian, keteladanan guru, serta interaksi siswa dalam konteks sekolah. Observasi ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara praktik nyata dengan nilai-nilai yang dinyatakan secara normatif oleh sekolah. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi sekolah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pendidikan karakter serta antikorupsi, guna memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka pendidikan karakter, *experiential learning*, dan nilai-nilai etika Islam berbasis Aswaja (Miles et al., 2018).

**Tabel 1.** Alur Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Kegiatan Utama	Output yang Dihasilkan
Perencanaan	Penentuan fokus riset, penyusunan instrumen wawancara & observasi, penetapan subjek penelitian	Fokus penelitian, pedoman wawancara, lembar observasi
Pengumpulan Data	Wawancara kepala sekolah, guru, dan komite; observasi pembelajaran & pembiasaan; pengumpulan dokumen sekolah	Transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen kebijakan
Reduksi Data	Seleksi dan pengelompokan data sesuai tema: strategi, implementasi, internalisasi nilai	Data tematik terpilah
Penyajian Data	Penyusunan data dalam narasi tematik dan matriks temuan	Pola strategi penanaman nilai antikorupsi
Analisis & Interpretasi	Pengaitan temuan dengan teori pendidikan karakter, <i>experiential learning</i> , dan nilai Aswaja	Analisis konseptual dan kontekstual
Validasi Temuan	Triangulasi sumber dan teknik (wawancara observasi dokumen)	Temuan yang kredibel dan konsisten
Penarikan Kesimpulan	Perumusan simpulan dan implikasi praktis	Model strategi penanaman nilai antikorupsi berbasis Aswaja

## RESULTS AND DISCUSSION

### Nilai-Nilai Antikorupsi dan Urgensinya dalam Pendidikan Dasar

Nilai-nilai antikorupsi merupakan seperangkat prinsip etis dan moral yang bertujuan mencegah serta melawan perilaku koruptif dalam berbagai aspek kehidupan. Secara konseptual, antikorupsi tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter individu agar memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan nilai dan

sikap, bukan semata-mata melalui pendekatan represif hukum (K.P.K., 2022). Dengan demikian, pendidikan nilai antikorupsi merupakan strategi preventif yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Nilai-nilai utama dalam pendidikan antikorupsi mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, keberanian, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk karakter individu yang berintegritas serta memiliki ketahanan moral terhadap praktik penyimpangan. Kejujuran menjadi fondasi utama karena korupsi berawal dari kebohongan dan manipulasi, sementara tanggung jawab dan keadilan berfungsi sebagai kontrol moral dalam relasi sosial dan penggunaan kekuasaan (Anwar, 2024). Pendidikan antikorupsi dengan demikian berorientasi pada pembentukan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* secara simultan.

Dalam perspektif pendidikan karakter, nilai-nilai antikorupsi tidak dapat ditanamkan secara efektif apabila hanya disampaikan sebagai pengetahuan normatif, melainkan harus diinternalisasikan melalui proses pembiasaan dan keteladanan yang konsisten dalam kehidupan sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas pada peserta didik sekolah dasar akan lebih kuat ketika nilai-nilai tersebut dihadirkan melalui pengalaman langsung, praktik keseharian, serta interaksi autentik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah (Nurtisna & Zainil, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *experiential learning* yang menekankan pentingnya pengalaman konkret dan refleksi dalam pembentukan sikap dan perilaku. Studi lain juga menegaskan bahwa keteladanan guru dan pembiasaan rutin di lingkungan sekolah merupakan faktor kunci dalam membentuk karakter integritas siswa, karena nilai yang dicontohkan dan dialami secara langsung lebih mudah terinternalisasi dibandingkan nilai yang hanya diajarkan secara verbal (Naurur Rifqi & Supriyadi, 2024). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menuntut integrasi yang utuh antara kurikulum, budaya sekolah, dan praktik keseharian agar nilai-nilai antikorupsi benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan hidup peserta didik.

Urgensi pendidikan antikorupsi menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan dunia pendidikan dasar. Sekolah dasar merupakan fase awal pembentukan karakter dan moral anak, di mana nilai-nilai dasar tentang benar dan salah mulai mengakar. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur seperti mencontek, mengambil hak orang lain, dan manipulasi kecil di usia dini berpotensi berkembang menjadi perilaku koruptif pada tahap kehidupan selanjutnya jika tidak ditangani secara sistematis (Sakban et al., 2025). Oleh karena itu, pendidikan dasar menjadi arena strategis untuk menanamkan nilai antikorupsi secara preventif.

Selain itu, pendidikan antikorupsi di tingkat dasar berfungsi sebagai benteng awal dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Anak-anak yang terbiasa dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial akan tumbuh menjadi warga negara yang memiliki kesadaran etis dan keberanian moral. UNESCO (2020) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi sejak dini berkontribusi langsung terhadap pembangunan *good governance* dan masyarakat yang berkeadilan (UNESCO, 2020). Dengan demikian, sekolah dasar tidak hanya berperan sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial.

Dalam konteks pendidikan Indonesia yang berlandaskan nilai religius dan budaya lokal, pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dapat diperkuat melalui integrasi nilai keagamaan dan kearifan lokal (Shobirin, 2014). Nilai-nilai seperti *amanah*, kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab moral yang diajarkan dalam tradisi keagamaan sejalan dengan prinsip antikorupsi modern. Integrasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi moral pendidikan antikorupsi, tetapi juga menjadikannya lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik (Muhaemin & Azis, 2019). Dengan demikian, penanaman nilai antikorupsi sejak pendidikan dasar merupakan kebutuhan mendesak untuk membentuk generasi yang berintegritas, berkarakter, dan berkomitmen terhadap keadilan sosial.

#### **Internalisasi Nilai Antikorupsi Berbasis Aswaja di SD NU Kota Metro**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SD NU Kota Metro menerapkan strategi penanaman nilai antikorupsi sejak dini melalui sebuah konsep yang dapat disebut sebagai "Tripusat Internalisasi". Strategi ini secara terpadu mengintegrasikan ranah kognitif-

normatif, afektif-spiritual, dan psikomotorik-praktis, dengan berlandaskan prinsip Aswaja an-Nahdliyah terutama tawasuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh yang dikontekstualisasikan menjadi nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Seperti diungkapkan oleh Kepala Sekolah dalam wawancara, pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata: "*Kami membangun fondasi karakter antikorupsi melalui pendekatan tawazun. Siswa tidak hanya tahu definisi jujur, tetapi dilatih untuk jujur dalam ujian, jujur mengembalikan barang teman, dan jujur mengakui kesalahan.*"

Implementasi strategi ini berjalan melalui tiga jalur utama yang saling terkait, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Tiga Jalur Implementasi Strategi dan Aktivitas Utama

No.	Jalur Implementasi	Bentuk Aktivitas	Contoh Kegiatan Konkret	Nilai Antikorupsi yang Ditanamkan
1	Integrasi dalam Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul tematik Aswaja-Antikorupsi</li> <li>- Kisah teladan (qishah)</li> <li>- Simulasi konflik moral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulasi "jaga kotak amal"</li> <li>- Diskusi kasus ketidakjujuran dalam kisah Nabi</li> <li>- Pembelajaran konsep amanah &amp; i'tidal</li> </ul>	Kejujuran, Amanah, Integritas, Keadilan
2	Pembiasaan Harian Terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Morning Value Session (15 menit)</li> <li>- Discipline Tracking System (Kartu Monitoring)</li> <li>- Sharing Friday</li> <li>- Rutinitas: antre, kebersihan, disiplin waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantin Kejujuran (tanpa penjaga)</li> <li>- Pemantauan kejujuran mengerjakan tugas</li> <li>- Refleksi pelanggaran antrean di kamar mandi</li> </ul>	Tanggung Jawab, Disiplin, Kepatuhan pada Aturan, Kejujuran
3	Budaya Sekolah & Ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keteladanan guru (modeling)</li> <li>- Ekstrakurikuler Pramuka</li> <li>- Sistem penghargaan non-akademik</li> <li>- Transparansi pengelolaan kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkemahan Pramuka dengan sistem tugas &amp; amanah regu</li> <li>- Pengumuman penggunaan dana kas kelas</li> <li>- Pemberian "Piagam Integritas" bulanan</li> </ul>	Kepemimpinan Bertanggung Jawab, Amanah, Kerja Sama, Transparansi

Pertama, **integrasi dalam pembelajaran**, khususnya mata pelajaran Aswaja, yang menjadi sarana utama internalisasi nilai. Guru mengembangkan modul tematik yang menyelaraskan nilai agama dengan prinsip antikorupsi, menggunakan metode kisah teladan (qishah) dan simulasi konflik moral. Seorang Guru Pendidikan Agama menjelaskan praktiknya: "*Dalam materi amanah, saya membuat simulasi di mana siswa diberi kepercayaan menjaga kotak amal kelas, lalu saya uji dengan meninggalkan uang di meja. Hasilnya, mayoritas siswa melaporkan dan menyerahkan uang tersebut. Inilah pembelajaran konkret.*" Observasi di kelas IV dan V memperkuat temuan ini, seperti dalam kegiatan "Kantin Kejujuran" tanpa penjaga yang berjalan dengan tingkat kesesuaian tinggi antara uang dan barang dalam periode satu bulan.

Integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran di SD NU Kota Metro dilaksanakan secara sistematis, terutama melalui mata pelajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) sebagai

wahana utama internalisasi nilai. Pembelajaran Aswaja dirancang tidak hanya sebagai penyampaian doktrin keagamaan, tetapi sebagai ruang pedagogis untuk membentuk integritas moral peserta didik melalui penguatan nilai *amanah*, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Guru mengembangkan modul tematik yang menyelaraskan nilai-nilai Aswaja dengan prinsip antikorupsi melalui metode kisah teladan (*qishah*), diskusi dilema moral, dan simulasi konflik etis. Seorang guru Pendidikan Agama (S) menjelaskan bahwa:

“...dalam materi amanah, siswa diberi kepercayaan menjaga kotak amal kelas, lalu diuji dengan meninggalkan sejumlah uang di ruang kelas tanpa pengawasan. Menurutnya, “mayoritas siswa melaporkan dan menyerahkan uang tersebut, dan dari situ anak-anak belajar bahwa kejujuran itu bukan hanya teori, tetapi harus dipraktikkan” (Wawancara S, 23 Juni 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman konkret mampu memperkuat internalisasi nilai antikorupsi secara lebih mendalam dibandingkan pendekatan ceramah semata.

Kedua, pembiasaan harian yang terstruktur menjadi tulang punggung strategi. Sekolah menciptakan rutinitas seperti *Morning Value Session* untuk refleksi, *Discipline Tracking System* berupa kartu monitoring perilaku, dan *Sharing Friday* sebagai forum berbagi pengalaman. Pembiasaan disiplin waktu, budaya antri, menjaga kebersihan, dan tanggung jawab atas barang pribadi maupun milik bersama dirancang sebagai latihan mikro untuk mencegah embrio perilaku koruptif seperti ketidakdisiplinan dan penyalahgunaan hak orang lain.

Strategi pembelajaran tersebut diperkuat oleh praktik pembiasaan harian yang terstruktur sebagai tulang punggung pendidikan antikorupsi di sekolah. SD NU Kota Metro mengembangkan sejumlah rutinitas seperti *Morning Value Session* untuk refleksi nilai, *Discipline Tracking System* melalui kartu monitoring perilaku, serta *Sharing Friday* sebagai forum berbagi pengalaman moral siswa. Guru kelas (BG) menjelaskan bahwa:

“...pembiasaan ini dirancang sebagai latihan konsistensi moral, bukan sekadar penegakan disiplin administratif. Ia menegaskan, “kami ingin anak-anak terbiasa jujur dan disiplin dalam hal kecil, seperti datang tepat waktu dan antri, karena dari situlah karakter mereka terbentuk” (Wawancara BG, 23 Juni 2025).

Pembiasaan disiplin waktu, budaya antri, menjaga kebersihan, serta tanggung jawab terhadap barang pribadi dan fasilitas sekolah diposisikan sebagai latihan mikro untuk mencegah embrio perilaku koruptif seperti ketidakdisiplinan, penyalahgunaan hak, dan pengabaian tanggung jawab sosial.

Ketiga, selain pembelajaran dan pembiasaan, strategi penanaman nilai antikorupsi diperkuat melalui budaya sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya Pramuka. Kegiatan Pramuka berfungsi sebagai media *experiential learning* yang memungkinkan peserta didik menguji nilai integritas dalam situasi semi-riil, seperti kepemimpinan regu, pembagian tugas, dan kegiatan perkemahan. Guru pembina Pramuka (Y) menyatakan bahwa:

“...melalui sistem regu dan rotasi kepemimpinan, siswa belajar bahwa amanah dan kejujuran memiliki konsekuensi sosial yang nyata. Ia menjelaskan, “kalau ketua regu tidak adil atau tidak jujur, anak-anak langsung merasakan dampaknya dalam kerja tim” (Wawancara Y, 23 Juni 2025).

Budaya sekolah juga diperkuat melalui keteladanan guru dalam transparansi, serta sistem penghargaan yang tidak hanya menekankan prestasi akademik, tetapi juga integritas dan tanggung jawab. Kombinasi antara pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di SD NU Kota Metro dibangun melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan.

### **Strategi Penanaman Nilai Antikorupsi Sejak Dini Berbasis Aswaja di SD NU Kota Metro**

Penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini dipahami sebagai sebuah proses pendidikan moral yang terintegrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam konteks SD NU Kota Metro, sebagaimana dipaparkan dalam landasan teoritik dan latar belakang penelitian, nilai-nilai ini dibangun di atas fondasi prinsip Aswaja an-Nahdliyah yang menekankan sikap tawasuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Prinsip-prinsip tersebut memiliki korespondensi yang kuat dengan nilai integritas yang menjadi inti dari pendidikan antikorupsi.

Strategi penanaman nilai antikorupsi berbasis *Ahlussunnah wal-Jama'ah* (Aswaja) pada hakekatnya menggabungkan tiga ranah pendidikan: kognitif (pengetahuan tentang nilai dan norma), afektif (internalisasi sikap dan kepekaan moral), serta psikomotorik/praktis (perilaku nyata dan kebiasaan). Landasan Aswaja terutama prinsip *tawazun* (keseimbangan), *amanah* (kepercayaan), *sidq* (kejujuran), dan *tasamuh* (toleransi) diadaptasi menjadi tujuan pendidikan yang konkret; misalnya, *amanah* diterjemahkan ke dalam tugas menjaga kotak amal, sedangkan *sidq* diwujudkan melalui praktik *kantin kejujuran*. Pendekatan ini menekankan bahwa pengajaran nilai antikorupsi tidak cukup berupa materi normatif, melainkan harus dirancang sebagai rangkaian pengalaman pedagogis yang menghubungkan pengetahuan, teladan guru, dan ritual pembiasaan harian sehingga membentuk disposisi moral yang stabil (Anwar, 2024; Fauzan, 2021).

Secara praktis di SD NU Kota Metro, kerangka Aswaja memperkuat legitimasi moral program antikorupsi sehingga pesan nilai menjadi relevan bagi siswa dan komunitas sekolah; legitimasi ini penting agar praktik pendidikan mudah diterima dan direplikasikan dalam konteks lokal. Implementasi berbasis pengalaman melalui modul tematik, simulasi, pembiasaan terstruktur, dan kegiatan ekstrakurikuler memungkinkan evaluasi perubahan perilaku sekaligus membangun kontinuitas antara praktik sekolah dan kewajiban sosial di rumah (Nurtisna & Zainil, 2025; Sakban et al., 2025). Dengan demikian, strategi berbasis Aswaja menawarkan model pendidikan antikorupsi yang kontekstual, berkelanjutan, dan terukur: kontekstual karena memanfaatkan nilai agama lokal sebagai sumber legitimasi; berkelanjutan karena mengintegrasikan pembiasaan harian; dan terukur karena pelaksanaannya memungkinkan indikator perilaku (mis. persentase pengembalian kotak amal, frekuensi pelanggaran aturan) untuk menilai efektivitas internalisasi nilai (Nurtisna & Zainil, 2025).

Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Sekolah SD NU Kota Metro, strategi penanaman nilai antikorupsi sejak dini dirancang secara sadar sebagai bagian dari visi kelembagaan sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Aswaja. Dalam wawancara mendalam, Kepala Sekolah (inisial D) menjelaskan bahwa:

*"...Pendidikan antikorupsi tidak diposisikan sebagai program tambahan, melainkan sebagai ruh dari seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Ia menyatakan bahwa "nilai antikorupsi kami bangun dari prinsip tawazun dan amanah. Anak-anak tidak cukup diberi tahu tentang kejujuran, tetapi harus dilatih dan dibiasakan mempraktikkannya dalam hal-hal kecil, seperti mengelola uang kelas, bersikap jujur saat ujian, dan berani mengakui kesalahan" (Wawancara D, 10 Juni 2025).*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja ke dalam kebijakan, kurikulum, dan budaya sekolah, sehingga pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada tataran wacana normatif, melainkan terinternalisasi melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman langsung peserta didik. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan strategi pendidikan antikorupsi sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi pimpinan sekolah dalam menerjemahkan nilai keagamaan menjadi praktik pedagogis yang konkret dan berkelanjutan.

Strategi penanaman nilai antikorupsi berbasis Aswaja pada SD NU Kota Metro dengan cara pembiasaan budaya antri dan sistem piket yang adil, hal ini merupakan latihan mikro (*micro-practice*) dalam keadilan distributif. Kegiatan ini mengajarkan bahwa hak untuk memperoleh pelayanan atau menggunakan fasilitas publik (dalam skala mikro: fasilitas sekolah) harus diakses berdasarkan prinsip kesetaraan dan bergiliran, bukan berdasarkan kuasa, uang, atau hubungan istimewa. Dengan demikian, prinsip Aswaja berfungsi sebagai meta-framework moral yang memberikan justifikasi yang dalam dan kontekstual bagi nilai-nilai universal antikorupsi, sekaligus mengisi kekosongan motivasional yang sering dialami pendekatan sekuler berbasis hukum dan ketakutan. Sementara itu, nilai *amanah* (dapat dipercaya) dan *kejujuran* menjadi jangkar spiritual sekaligus psikologis dalam proses internalisasi. Dalam kerangka teori perkembangan moral Kohlberg (2017), pengajaran nilai-nilai ini yang terintegrasi dengan keyakinan agama memfasilitasi transisi dari moralitas *pre-conventional* (menghindari hukuman) menuju *conventional* (mematuhi norma sosial yang dianggap baik) dan bahkan menyentuh *post-conventional* (berdasarkan prinsip etis universal) (D. A. Kolb, 2017). Ketika seorang siswa menolak menyontek bukan karena takut pada sanksi,

tetapi karena memahami bahwa itu adalah pengkhianatan terhadap *amanah* dari guru dan orang tua, serta bertentangan dengan sifat *siddiq* (jujur) yang dicontohkan Nabi, maka internalisasi nilai telah mencapai level yang lebih dalam. Hal ini selaras dengan pandangan Lickona (2019) yang menekankan bahwa pembentukan karakter yang baik (*good character*) memerlukan ekosistem yang memperhatikan bukan hanya moral knowing (pengetahuan moral) dan moral action (tindakan moral), tetapi juga *moral feeling* (perasaan moral) (Lickona, 2019). Dimensi spiritual dari Aswaja inilah yang menggerakkan moral feeling, memberikan rasa malu (*al-ḥayā'*), tanggung jawab, dan komitmen intrinsik yang jauh lebih kuat daripada sekadar pemahaman kognitif tentang larangan korupsi.

Analisis menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi selama ini sering terjebak pada penyampaian normatif dan kognitif, tanpa memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Dalam kerangka teori perkembangan moral menurut Kolb (2017), pembelajaran moral yang efektif harus melibatkan pengalaman konkret, refleksi, dan aplikasi nyata (D. A. Kolb, 2017). SD NU Kota Metro telah mengembangkan pendekatan yang relatif komprehensif melalui integrasi kurikulum Aswaja, pembiasaan harian, dan kegiatan ekstrakurikuler, terutama Pramuka. Ketika seorang siswa menolak menyontek bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena memahami bahwa itu adalah pengkhianatan terhadap *amanah* dari guru dan orang tua, serta bertentangan dengan sifat *siddiq* (jujur) yang dicontohkan Nabi, maka internalisasi nilai telah mencapai level yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Lickona (2019) yang menekankan pentingnya ekosistem pendidikan karakter yang kuat, bukan hanya modul pembelajaran formal (Lickona, 2019). Dimensi spiritual dari Aswaja inilah yang menggerakkan moral feeling, memberikan rasa malu (*al-ḥayā'*), tanggung jawab, dan komitmen intrinsik yang jauh lebih kuat daripada sekadar pemahaman kognitif tentang larangan korupsi.

Fenomena korupsi yang masih tinggi di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam laporan KPK (2022) serta kajian Transparency International (2023), mempertegas pentingnya pendidikan antikorupsi berbasis nilai sejak usia dini (Indonesia, 2022; International, 2023). Dalam analisis konteks sosial, korupsi tidak hanya muncul sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga mencerminkan krisis moral yang berakar pada pola pembentukan karakter yang tidak tuntas. Oleh karena itu, strategi penanaman nilai antikorupsi di SD NU Kota Metro perlu dipahami sebagai bentuk intervensi preventif yang menysasar akar perilaku, bukan sekadar gejala.

Pendekatan Aswaja menjadi landasan kultural dan pedagogis yang kuat dalam penelitian ini, karena nilai-nilai seperti amanah, jujur, tawazun, dan *i'tidal* bukan hanya ajaran moral tetapi bagian dari tradisi NU yang hidup dalam keseharian. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum Aswaja dan pembiasaan harian menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya mengajarkan konsep antikorupsi, tetapi menanamkan karakter integral melalui pengalaman langsung.

## **Implementasi Strategi Penanaman Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran, Pembiasaan, dan Budaya Sekolah**

### **a. Strategi Penanaman Nilai melalui Mata Pelajaran Aswaja**

Penanaman nilai antikorupsi dalam pembelajaran di SD NU Kota Metro dilaksanakan melalui integrasi nilai kejujuran, *amanah*, tanggung jawab, dan keadilan ke dalam proses belajar mengajar secara terstruktur, kontekstual, dan berkelanjutan, dengan mata pelajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) sebagai basis nilai utama. Pembelajaran Aswaja tidak diposisikan semata sebagai transmisi doktrin keagamaan, melainkan sebagai kerangka etis-teologis yang secara sistematis mengarahkan pembentukan integritas peserta didik. Prinsip *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *sidq* (kejujuran) dikontekstualisasikan menjadi nilai antikorupsi yang operasional, sehingga peserta didik tidak hanya memahami korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai penyimpangan moral dan spiritual. Dalam praktik pembelajaran, guru tidak berhenti pada penyampaian konsep normatif, melainkan mengaitkan nilai tersebut dengan realitas kehidupan siswa melalui studi kasus, kisah teladan (*qishah*), diskusi dilema moral, serta simulasi situasi etis. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *experiential learning*, yang menegaskan bahwa internalisasi nilai akan

berlangsung efektif ketika peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang reflektif dan bermakna, bukan sekadar menerima pengetahuan secara pasif.

Implementasi strategi melalui mata pelajaran Aswaja menunjukkan pola integrasi tematik-spiral yang sistematis dan berjenjang. Hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen kurikulum mengungkap bahwa kurikulum Aswaja di SD NU Kota Metro dirancang secara sadar untuk membangun kerangka moral teologis sebagai fondasi pendidikan antikorupsi. Lima pilar nilai utama yang dikembangkan *amanah*, *sidq*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *mas'uliyah* tidak disajikan secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam setiap kompetensi pembelajaran. Nilai *amanah* menekankan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab personal sebagai inti integritas; *sidq* mengajarkan kejujuran sebagai sikap eksistensial, bukan sekadar kepatuhan aturan; sementara *tawazun* dan *i'tidal* membentuk sensitivitas etis peserta didik dalam menimbang kepentingan diri dan orang lain secara adil. Dengan demikian, nilai antikorupsi tidak diajarkan sebagai larangan abstrak, tetapi sebagai kemampuan moral untuk mengambil keputusan yang berkeadilan dalam situasi konkret.

Praktik integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran Aswaja tercermin dari penggunaan metode pedagogis yang berorientasi pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab moral. Guru secara konsisten menekankan perilaku jujur dalam setiap aktivitas pembelajaran, mulai dari pengerjaan tugas, proses evaluasi, hingga interaksi antarsiswa. Peserta didik diajak memahami bahwa penyalahgunaan wewenang, ketidakjujuran, dan manipulasi sekecil apa pun merupakan embrio perilaku koruptif yang harus dicegah sejak dini. Analisis mendalam menunjukkan bahwa integrasi nilai ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diaktualisasikan melalui penegakan aturan kelas yang konsisten, seperti larangan mencontek dan penegasan tanggung jawab individual atas setiap tugas. Lingkungan belajar yang demikian menciptakan ruang pedagogis yang kondusif bagi pembentukan karakter antikorupsi, karena nilai tidak hanya diajarkan, tetapi dialami dan diuji dalam praktik nyata.

Lebih jauh, pembelajaran Aswaja memberikan dasar spiritual yang kuat bagi peserta didik untuk memahami bahwa perilaku koruptif bertentangan secara fundamental dengan ajaran Islam. Nilai-nilai keagamaan berfungsi sebagai penguat moral internal yang melampaui pendekatan instruksional, karena bersumber dari keyakinan religius peserta didik. Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi nilai antikorupsi melalui Aswaja mampu menciptakan transdisiplinartitas moral antara pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, sekaligus mengatasi dikotomi yang kerap muncul dalam pendidikan karakter (Firdian, 2025). Dalam perspektif *Moral Foundation Theory*, nilai-nilai Aswaja yang diinternalisasikan menyentuh berbagai fondasi moral secara simultan, seperti *care/harm* melalui *amanah*, *fairness/cheating* melalui *i'tidal*, dan *authority/subversion* melalui kesadaran tanggung jawab kepada Allah dan aturan sosial (Bagas, 2025). Kontekstualisasi teologis ini menjadi kekuatan utama strategi, karena nilai antikorupsi dipahami bukan sebagai konsep sekuler yang asing, melainkan sebagai konsekuensi logis dari keyakinan keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan peserta didik.

Namun demikian, analisis kritis juga mengidentifikasi tantangan implementasi yang perlu mendapat perhatian serius. Observasi lapangan menunjukkan adanya variasi kompetensi pedagogis di antara guru dalam mengintegrasikan nilai antikorupsi secara efektif. Sebagian guru masih cenderung menggunakan pendekatan ceramah dan moralistik, sementara sebagian lainnya telah mengembangkan metode interaktif yang lebih reflektif dan partisipatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh kapasitas pedagogis guru sebagai aktor utama internalisasi nilai. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar integrasi nilai antikorupsi berbasis Aswaja dapat berjalan secara konsisten, mendalam, dan berdampak jangka panjang.

#### **b. Strategi Penanaman Nilai melalui Pembiasaan Harian di Sekolah**

Pembiasaan harian merupakan komponen strategis dalam implementasi pendidikan antikorupsi karena berfungsi sebagai medium transformasi nilai dari ranah kognitif ke dalam perilaku nyata peserta didik. Dalam konteks pendidikan karakter, pembiasaan

dipahami sebagai proses sosial yang berulang untuk membentuk *habitus* moral siswa, bukan sekadar transfer informasi nilai (Rosyida, 2023). Ketika praktik disiplin waktu, tanggung jawab tugas, budaya antre, dan kejujuran menjadi bagian rutin aktivitas sekolah, perilaku ini terinternalisasi melalui pengulangan yang konsisten sehingga mulai mempengaruhi keputusan moral yang lebih kompleks di luar sekolah. Hal ini selaras dengan temuan bahwa pembiasaan terstruktur membantu peserta didik tidak hanya memahami nilai antikorupsi secara konseptual tetapi juga melatih respon perilaku terhadap dilema moral sehari-hari (Nurtisna & Zainil, 2025).

Di SD NU Kota Metro, strategi pembiasaan harian dirumuskan dalam desain tiga lapisan aktivitas: rutinitas pagi, integrasi ke dalam aktivitas pembelajaran, dan transisi antar kegiatan. Hasil observasi selama periode 30 hari mencatat 12 ritual harian yang dilaksanakan dengan tingkat partisipasi siswa di atas 90%, termasuk disiplin waktu, doa sebelum dan sesudah kegiatan, budaya antre, serta tanggung jawab terhadap fasilitas bersama. Pola ini menguatkan temuan penelitian karakter bahwa kesinambungan rutinitas harian merupakan salah satu prediktor kuat dalam pembentukan perilaku moral jangka panjang, karena kebiasaan yang terbentuk menjadi otomatis dalam konteks yang stabil (Jannah & Tanjung, 2024). Dengan demikian, pembiasaan harian amat penting untuk menghambat munculnya perilaku manipulatif dan ketidakjujuran sejak usia dasar.

Kejelasan hubungan antara pembiasaan dan nilai antikorupsi dapat dilihat dari praktik spesifik seperti budaya antre dan tanggung jawab atas fasilitas sekolah, yang secara prinsip mengajarkan penghormatan terhadap hak orang lain dan keadilan sosial. Sejalan dengan teori *social learning*, pembiasaan yang melibatkan observasi dan imitasi terhadap perilaku guru dan teman sebaya memperkuat internalisasi norma sosial yang menolak penyalahgunaan hak dan kekuasaan (Sebayang et al., 2023). Dalam perspektif ini, budaya antre bukan sekadar aturan logistik, tetapi *laboratorium sosial mini* di mana siswa mempelajari bagaimana keputusan adil dan sikap menghormati orang lain dipraktikkan dalam kehidupan nyata, yang merupakan inti dari kompetensi antikorupsi (Sebayang et al., 2023).

Namun, efektivitas strategi pembiasaan harian ini juga bergantung pada konsistensi lingkungan sosial yang lebih luas. Temuan wawancara dengan siswa menunjukkan adanya disonansi nilai antara sekolah dan praktik yang mereka temui di rumah atau masyarakat, misalnya kecenderungan “nyelonong” di luar sekolah. Temuan ini mencerminkan bahwa pembiasaan yang efektif tidak hanya membutuhkan konsistensi internal sekolah tetapi juga kolaborasi luas dengan orang tua dan komunitas untuk memperluas lingkungan nilai yang saling mendukung (Saputri et al., 2024). Tanpa dukungan ekosistem nilai yang lebih luas, kebiasaan moral yang dibentuk di sekolah berisiko menjadi terfragmentasi ketika peserta didik kembali ke konteks sosial lain (Lesilolo, 2018).

#### c. Strategi Penanaman Nilai melalui Ekstrakurikuler Pramuka

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD NU Kota Metro berfungsi sebagai *laboratorium karakter* yang menyediakan ruang belajar autentik bagi internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pengalaman langsung. Berdasarkan observasi terhadap delapan kali pertemuan rutin dan satu kegiatan perkemahan akhir pekan, ditemukan empat mekanisme utama penanaman nilai, yaitu sistem regu dengan rotasi kepemimpinan, skenario *problem-solving* moral, mekanisme *reward and consequence*, serta refleksi pasca-kegiatan. Pola ini menunjukkan bahwa Pramuka tidak hanya berperan sebagai kegiatan pendukung, tetapi sebagai wahana pedagogis yang dirancang untuk menguji integritas peserta didik dalam situasi semi-riil. Temuan ini sejalan dengan prinsip *experiential learning* yang menegaskan bahwa nilai moral akan lebih efektif terinternalisasi ketika peserta didik mengalami langsung konsekuensi dari tindakan yang diambil, bukan sekadar mempelajarinya secara konseptual (Purnami & Rohayati, 2016).

Nilai-nilai antikorupsi dalam Pramuka diinternalisasikan melalui pengamalan *Dasa Dharma*, khususnya nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan tolong-menolong tanpa pamrih. Peserta didik dilatih memegang *amanah* ketika diberi tanggung jawab menjaga perlengkapan regu, menyelesaikan tugas bersama, serta mematuhi kesepakatan kelompok

tanpa manipulasi. Dalam perspektif pendidikan karakter, *amanah* merupakan inti dari integritas personal dan menjadi fondasi utama perilaku antikorupsi, karena korupsi pada dasarnya merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (Anggrena et al., 2025). Dengan demikian, aktivitas Pramuka menyediakan konteks konkret untuk melatih kepercayaan dan tanggung jawab sebagai kompetensi moral dasar.

Aspek kepemimpinan dalam sistem regu Pramuka memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap antikorupsi, terutama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Rotasi kepemimpinan memungkinkan peserta didik mengalami peran sebagai pemimpin dan anggota secara bergantian, sehingga memahami bahwa kekuasaan harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam kerangka *situated learning* dan *community of practice*, pembelajaran nilai berlangsung efektif ketika individu terlibat dalam praktik sosial nyata dan merasakan langsung dampak keputusan moralnya terhadap kelompok (Dikayuana et al., 2019). Ketika seorang ketua regu bersikap tidak adil, konsekuensi sosial seperti menurunnya kepercayaan dan kinerja kelompok muncul secara alami, menciptakan umpan balik moral yang lebih kuat dibandingkan sanksi formal dari guru (Prasetyawan, 2018).

Kegiatan perkemahan dan latihan kolaboratif dalam Pramuka juga membangun kepekaan moral dan sikap saling percaya melalui pengalaman emosional yang intens. Peserta didik belajar bahwa kecurangan, kemalasan, atau ketidakjujuran tidak hanya melanggar aturan, tetapi merugikan orang lain dan merusak solidaritas kelompok. Analisis ini sejalan dengan kerangka *social-emotional learning* (SEL) yang menekankan pentingnya pengalaman afektif dalam internalisasi nilai moral, karena emosi berperan besar dalam pembentukan keputusan etis jangka panjang. Melalui pengalaman tersebut, Pramuka berhasil menjembatani kesenjangan antara pemahaman kognitif dan komitmen afektif (*cognitive affective gap*) dalam pendidikan antikorupsi.

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya konvergensi nilai antara *Dasa Dharma Pramuka* dan prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja), seperti *taqwa*, *rahmah*, dan keadilan sosial. Koherensi nilai ini memperkuat proses internalisasi karena peserta didik menerima pesan moral yang konsisten dari berbagai ranah pendidikan. Namun demikian, analisis juga mengidentifikasi tantangan struktural berupa ketimpangan akses terhadap kegiatan Pramuka, khususnya perkemahan yang memerlukan biaya tambahan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan eksklusi sosial dan bertentangan dengan nilai keadilan yang justru ingin ditanamkan. Oleh karena itu, keberlanjutan Pramuka sebagai media pendidikan antikorupsi menuntut kebijakan sekolah yang lebih inklusif agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pembelajaran nilai berbasis pengalaman.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Nilai Antikorupsi pada Peserta Didik**

Faktor pendukung utama internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik di SD NU Kota Metro berasal dari dinamika internal sekolah, khususnya kepemimpinan institusional dan konsistensi kebijakan pendidikan karakter. Kepemimpinan sekolah yang visioner dan berorientasi nilai berperan sebagai *moral driver* yang memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak bersifat simbolik, melainkan terintegrasi dalam kurikulum, pembiasaan, dan budaya sekolah. Dalam perspektif *transformational leadership theory*, pemimpin pendidikan yang konsisten dalam keteladanan dan pengambilan kebijakan berbasis nilai mampu membentuk iklim moral yang kondusif bagi internalisasi karakter peserta didik (Bass & Riggio, 2006). Di SD NU Kota Metro, komitmen pimpinan sekolah terhadap nilai Aswaja dan integritas tercermin dalam kebijakan anti-pungli, transparansi pengelolaan kelas, serta dukungan terhadap program pembiasaan dan ekstrakurikuler, yang secara kumulatif memperkuat internalisasi nilai antikorupsi sejak dini (Anwar, 2024).

Faktor pendukung berikutnya adalah keselarasan nilai antara pendidikan antikorupsi dan landasan religius Aswaja yang menjadi identitas kelembagaan sekolah. Dalam perspektif *value congruence theory*, internalisasi nilai akan lebih efektif ketika nilai yang diajarkan selaras dengan sistem keyakinan dan budaya peserta didik (Edwards & Cable, 2009). Nilai-nilai seperti

*amanah*, *sidq*, dan *mas'uliyah* yang diajarkan dalam tradisi Aswaja memiliki korespondensi langsung dengan prinsip antikorupsi modern, sehingga peserta didik tidak memandang pendidikan antikorupsi sebagai norma eksternal, melainkan sebagai bagian dari kewajiban moral dan spiritual. Temuan ini sejalan dengan penelitian pendidikan karakter berbasis keagamaan yang menunjukkan bahwa integrasi nilai religius mampu memperkuat motivasi internal dan kontrol diri peserta didik dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, faktor penghambat utama internalisasi nilai antikorupsi berasal dari dinamika eksternal, khususnya disonansi nilai antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga atau masyarakat. Teori *ecological systems* dari Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan moral anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan, mulai dari sekolah hingga konteks sosial yang lebih luas (Bronfenbrenner, 1979). Dalam konteks SD NU Kota Metro, praktik ketidakjujuran atau penyalahgunaan aturan yang disaksikan peserta didik di luar sekolah berpotensi melemahkan konsistensi nilai yang dibangun melalui pembelajaran dan pembiasaan di sekolah. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *value dissonance*, di mana peserta didik mengalami kebingungan moral karena menerima pesan nilai yang kontradiktif dari lingkungan yang berbeda (Hasibuan & Siregar, 2025).

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan variasi kapasitas pedagogis guru dalam mengintegrasikan nilai antikorupsi secara reflektif dan partisipatif. Meskipun secara normatif guru memahami pentingnya pendidikan antikorupsi, tidak semua guru memiliki keterampilan pedagogis yang memadai untuk menerjemahkan nilai menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Dalam perspektif *pedagogical content knowledge* (PCK), efektivitas pendidikan nilai sangat ditentukan oleh kemampuan guru mengaitkan substansi nilai dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik (Kind, 2009). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rosyida, 2023) yang menegaskan bahwa pendidikan karakter sering terjebak pada pendekatan ceramah dan moralistik apabila tidak disertai pelatihan pedagogis berkelanjutan. Secara keseluruhan, analisis faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai antikorupsi di SD NU Kota Metro menunjukkan bahwa keberhasilan proses internalisasi sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor internal sekolah dan dukungan lingkungan eksternal. Dalam kerangka *social learning theory*, internalisasi nilai akan optimal ketika peserta didik memperoleh model perilaku yang konsisten dan penguatan sosial yang sejalan di berbagai konteks kehidupan (Bandura, 1977). Oleh karena itu, penguatan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada institusi sekolah, melainkan memerlukan kolaborasi strategis dengan orang tua dan masyarakat agar terbentuk ekosistem nilai yang koheren dan berkelanjutan. Tanpa dukungan ekosistem tersebut, internalisasi nilai berisiko bersifat situasional dan tidak bertransformasi menjadi karakter yang menetap dalam diri peserta didik.

## CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini di SD NU Kota Metro dilaksanakan melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual dengan berbasis nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Strategi tersebut terwujud dalam model yang terintegrasi antara pembelajaran intrakurikuler (khususnya mata pelajaran Aswaja), pembiasaan harian yang terstruktur, serta penguatan budaya sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka. Nilai-nilai inti antikorupsi kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan keadilan (*i'tidal*) tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi diinternalisasikan melalui pengalaman nyata, keteladanan guru, dan praktik keseharian peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai keagamaan lokal mampu memperkuat legitimasi moral dan kedalaman internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik sekolah dasar. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan internalisasi nilai antikorupsi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah yang konsisten, keselarasan nilai Aswaja dengan prinsip antikorupsi, serta budaya sekolah yang mendukung pembiasaan integritas. Namun demikian, proses internalisasi masih menghadapi tantangan berupa disonansi nilai antara sekolah dan lingkungan keluarga, variasi kapasitas pedagogis guru dalam mengintegrasikan nilai secara reflektif, serta keterbatasan instrumen evaluasi integritas

peserta didik. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model pendidikan antikorupsi berbasis Aswaja yang bersifat implementatif dan kontekstual, serta menempatkan nilai keagamaan lokal sebagai fondasi normatif dan praksis dalam pembentukan karakter antikorupsi sejak pendidikan dasar.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penguatan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dilakukan melalui pengembangan kebijakan sekolah yang lebih sistematis dan berkelanjutan, khususnya dengan memperkuat pelatihan pedagogis guru dalam integrasi nilai antikorupsi berbasis Aswaja. Selain itu, diperlukan kolaborasi strategis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membangun ekosistem nilai yang konsisten guna meminimalkan disonansi moral peserta didik. Secara akademik, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan instrumen evaluasi integritas yang lebih terukur serta menguji replikasi model pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan lokal di konteks sekolah dasar lainnya, sehingga kontribusi teoretis dan praktis penelitian ini dapat diperluas dalam kebijakan pendidikan karakter nasional.

## REFERENCES

- Aksinudin, S., Wiyono, S., & Nariswari, A. F. (2022). Civic education as anti-corruption education for college students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 53-63. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anggreni, A. A. S. O., Putri, A. M., & Gusmaneli, G. (2025). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Praktik Pendidikan Sekolah. *Journal Educational Research and Development | E-ISSN: 3063-9158*, 1(4), 368-373.
- Anwar, M. (2024). Strategi pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 18(1), 12-25. <https://doi.org/10.21009/jpd.181.02>
- Ayu, R. F. K., Nafiah, N., Rahayu, D. W., & Akhwani, A. (2022). Implementation of anti-corruption values through extracurricular activities in elementary school: literature reviews. *Education and Human Development Journal*, 7(01), 85-96. <https://doi.org/10.33086/ehdj.v7i01.2721>
- Bagas, S. (2025). *Implementasi Nilai-Nilai Aswaja dalam Membentuk Moral Peserta Didik MI Al Hikmah Bandar Lampung*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Harvard University Press.
- Dikayuana, D., Sulastri, S., & Fedryansyah, M. (2019). Community Practice Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) di Kota Bandung. *Share: Social Work Journal*, 9(2), 142-148.
- Edwards, J. R., & Cable, D. M. (2009). The value of value congruence. *Journal of Applied Psychology*, 94(3), 654-677. <https://doi.org/10.1037/a0014891>
- Fauzan, M. (2021). *Pendidikan nilai dalam tradisi Aswaja*. Khalista Press.
- Firdian, M. S. F. (2025). Relevansi Nilai-nilai Aswaja dalam Membentuk Karakter Pelajar di Era Digital. *Aksioreligia*, 3(1), 52-59.
- Hasibuan, R. F., & Siregar, N. S. (2025). Synergy Between Teachers and Parents in Shaping Students' Responsible Learning Character at MAN 1 Medan: Collaboration Model and Its Challenges. *Journal of Educational Sciences*, 9(4), 3132-3144.
- Indonesia, K. P. K. R. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. <https://www.kpk.go.id>
- International, T. (2023). *Global Corruption Report 2023*. <https://www.transparency.org>
- Jannah, R., & Tanjung, E. F. (2024). Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter Religius di MA Swasta Al-Ulum Medan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1615-1626.
- Johnston, M. (2019). *Corruption, Contention and Reform*.
- K.P.K. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Khaldun, I. (2015). *Al-Muqaddimah*. Dar al-Fikr.
- Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential

- for progress. *Studies in Science Education*, 45(2), 169–204.
- Kolb, D. (2027). *Experiential Learning Theory*. Pearson.
- Kolb, D. A. (2017). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Pearson.
- Lesilolo, H. J. (2018). Penerapan teori belajar sosial albert bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 4(2), 186–202.
- Lickona, T. (2019). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Muhaemin, M., & Azis, M. (2019). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Luwu dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. *Al-Qalam Jurnal Keagamaan Dan Sosial Budaya*, 25(2).
- Mustari, M. (2020). *Keteladanan guru dalam pendidikan karakter*. Refika Aditama.
- Naurur Rifqi, N. R., & Supriyadi, S. (2024). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Religius dan Integritas Siswa Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 4916–4930.
- Ningrum, E. C., & Prastyaningsih, Y. P. (2024). Strategic approaches to cultivating anti-corruption values in primary education: A case study of SDN Blimbing Gudo Jombang. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 12, 1. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v12i1.61102>.
- Nurtisna, A., & Zainil, M. (2025). Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.349>
- Prasetyawan, Y. Y. (2018). Community of Practice Sebagai Wadah Berbagi Pengetahuan Berdimensi Teknis dan Kognitif. *Anuwa: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 2(2), 117–125.
- Purnami, R. S., & Rohayati, R. (2016). Implementasi Metode Experiential Learning Dalam Pengembangan Softskills Mahasiswa Yang Menunjang Integrasi Teknologi, Manajemen Dan Bisnis. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1).
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Model internalization of moral values. *International Journal of Education*, 14(3), 140–155. <https://doi.org/10.1080/ije.2021.33345>
- Restuningtyas, A. B., & Utomo, A. C. (2024). Pendidikan Antikorupsi: Penanaman Karakter Jujur melalui Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 12(1), 86–98.
- Rosyida, A. (2023). Pembudayaan pendidikan moral pada anak sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 132–140.
- Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., & Syaifullah, S. (2025). Strengthening the Values of Honesty and Simplicity in Elementary School Children as Anti-Corruption Role Models. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 423–434. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6880>
- Saputri, I., Rafifah, S. I., & Chanifudin, C. (2024). Pentingnya Kolaborasi Orang Tua, Sekolah, dan Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan Karakter Anak. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 782–790.
- Sebayang, D. P., Pitoewas, B., & Halim, A. (2023). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(1), 39–49.
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, 1(2), 107–117.
- Sofianto, A. (2021). *Analisis Bias dalam Penelitian Nilai Moral pada Peserta Didik*. Alfabeta.
- Suyatno, S., & Haryanto, H. (2020). Pendidikan Moral Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 50–66. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.31245>
- UNESCO. (2020). *Integrity and education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>